

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade, *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah berkembang sebagai fokus utama dalam berbagai studi akademik, yang terlihat dari banyaknya penelitian (Chen dkk., 2018; Li & Guo, 2022; Park, 2022; Sucahyati dkk., 2022; Tee dkk., 2024). Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan muncul dari adanya indikator yang menilai sejauh mana perusahaan berkontribusi dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Hal ini didorong oleh berkembangnya pandangan global di kalangan pemangku kepentingan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara finansial, tetapi juga perlu memenuhi harapan serta kewajiban yang bersifat non-keuangan (Ananzeh dkk., 2023).

CSR diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Pengungkapan ini bertujuan untuk menunjukkan dampak dari aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, serta penggunaan sumber daya alam, dan disusun sesuai dengan pedoman pelaporan yang berlaku (Ludya & Dewi, 2024). Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) terus berkembang dan kini menjadi elemen penting bagi setiap perusahaan. Laporan ini berperan sebagai wadah bagi perusahaan dalam mengomunikasikan informasi mengenai performa ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan (Surono & Mayangsari, 2022).

Beberapa negara yang telah mewajibkan peraturan mengenai penerbitan laporan keberlanjutan antara lain Malaysia pada tahun 2007, Cina pada 2008, Denmark pada 2009, dan Afrika Utara pada tahun 2010. Selanjutnya, Brasil, Hong Kong, dan India membuat peraturan wajib pada tahun 2012 (Ioannou & Serafeim, 2019).



Gambar 1. Penerbitan Laporan Keberlanjutan di Indonesia
Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

Di Indonesia, penerbitan laporan keberlanjutan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017. Berdasarkan regulasi tersebut, emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk menyusun dan mengutarakan laporan keberlanjutan setiap tahun, dengan implementasi yang seharusnya dimulai pada 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, penerapan kewajiban tersebut ditunda hingga 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 88% perusahaan di Indonesia telah menerbitkan *sustainability report*, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 77%. (PwC, 2023). Tren positif ini terus berlanjut, di mana pada Desember 2024, sebanyak 882 perusahaan tercatat di BEI, atau 94% dari total emiten saat itu, telah

menerbitkan Laporan keberkelanjutan untuk tahun pelaporan 2023, mencerminkan peningkatan dalam publikasi *Sustainability Report* di Indonesia (IDX, 2025). Meskipun tingkat pelaporan laporan keberlanjutan di Indonesia relatif tinggi, kualitas pelaporan tersebut masih tergolong rendah. Diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), kualitas *Sustainability Report* di Indonesia hanya mencapai 23% (Dara, 2022). GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling umum digunakan di Indonesia. Pada tahun 2021, sebanyak 80% emiten yang diteliti di Indonesia menyampaikan jika mereka mengadopsi standar tersebut dalam penyusunan laporan keberlanjutan (PwC, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak perusahaan telah menyusun laporan keberlanjutan, substansi dan transparansi informasi yang disajikan masih belum optimal.

Kurangnya transparansi dalam pelaporan keberlanjutan juga tercermin dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan Bank Indonesia. Dalam kasus ini, dana CSR diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, di mana sebagian dana dialokasikan kepada yayasan yang kurang memenuhi standar kelayakan dan diduga melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (CNN Indonesia, 2024). Meskipun Bank Indonesia bukan perusahaan publik, kasus ini mencerminkan bagaimana koneksi politik dapat membuka celah penyalahgunaan dana CSR ketika tidak diimbangi dengan transparansi.

Sejalan dengan fenomena tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap praktik pengungkapan

CSR. Park, (2022) menemukan bahwa keberadaan koneksi politik menurunkan tingkat pengungkapan CSR dengan rata-rata sebesar 4,9%. Kondisi ini dapat terjadi karena ketika CSR diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi melalui koneksi politik, perannya sebagai sumber legitimasi independen melemah, sehingga praktik pengungkapan CSR justru mengalami penurunan. Selain menimbulkan dampak negatif, hubungan politik dengan CSR juga dapat memberikan manfaat positif bagi perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan hubungan politik untuk mengurangi tekanan dari pemangku kepentingan terkait keterlibatan mereka dalam CSR. Terdapat hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan pemerintah, di mana aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mendukung kepentingan pemerintah, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat serta dukungan politik secara berkelanjutan (Surono & Mayangsari, 2022). Koneksi politik didefinisikan berdasarkan latar belakang politik yang melekat pada dewan pengurus suatu perusahaan, termasuk komisaris dan direktur (Sucahyati dkk., 2022). Koneksi politik memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk berbagai kemudahan dari pemerintah, seperti pelonggaran regulasi, insentif pajak, akses lebih mudah terhadap dana talangan, kemudahan dalam memperoleh kontrak, serta dukungan dalam mengatasi hambatan untuk memasuki suatu industri (Mardiana dkk., 2024).

Penelitian Selin dkk. (2023) menunjukkan bahwa koneksi politik perusahaan, terutama melalui hubungan dengan tokoh militer dan individu yang memiliki keahlian industri, berkontribusi pada peningkatan komitmen

CSR. Sementara itu, Sucahyati dkk. (2022) mengungkapkan jika perusahaan dengan afiliasi politik lebih tinggi mengungkapkan CSR karena ingin memperkuat hubungan dengan pemerintah, menjaga legitimasi bisnis, serta memenuhi tuntutan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memengaruhi strategi CSR perusahaan, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Berdasarkan fenomena dan kasus yang terjadi, keterkaitan antara koneksi politik dan CSR masih menjadi topik yang relevan untuk diteliti. Meskipun CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, keterlibatan politik dalam praktiknya dapat menimbulkan berbagai pertimbangan strategis bagi perusahaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan dan rendahnya transparansi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan penelitian terdahulu melalui analisis lebih mendalam mengenai keterkaitan koneksi politik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan definisi koneksi politik yang dikembangkan oleh Faccio serta memperkuat analisis dengan mengacu pada definisi yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia. Sementara itu, pengungkapan CSR diukur berdasarkan jumlah indikator yang disajikan dalam *Sustainability Report* atau laporan tahunan yang mencantumkan bagian tertentu tentang keberlanjutan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GRI.

Salah satu keterbaruan penelitian ini adalah memperbarui periode analisis menjadi tahun 2019–2023 dengan fokus pada satu rezim pemerintahan, yaitu periode kedua kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Penelitian ini memanfaatkan data perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama masa 2019–2023 untuk mengevaluasi bagaimana koneksi politik memengaruhi transparansi dan pengungkapan CSR dalam satu rezim pemerintahan terbaru. Fokus pada satu rezim pemerintahan dipilih untuk menghindari bias kebijakan antar periode dan memberikan gambaran yang lebih konsisten terhadap keterkaitan antara koneksi politik dan pengungkapan CSR.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akuntansi, terkhusus yang berkaitan dengan hubungan koneksi politik dan pengungkapan CSR. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbarui regulasi CSR, terutama bagi perusahaan dengan koneksi politik.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah koneksi politik mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, sehingga tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:.

1. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan pengungkapan CSR terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan memperkuat teori legitimasi, yang berangkat dari asumsi bahwa organisasi atau perusahaan beroperasi berdasarkan nilai, norma, dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa suatu perusahaan akan berusaha memastikan tindakannya dapat diterima oleh masyarakat agar keberadaannya terus memperoleh dukungan dan dianggap sah secara sosial. Pengungkapan CSR yang transparan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai sosial, lingkungan, dan kesejahteraan publik sekaligus membangun citra positif di mata masyarakat. Koneksi politik memengaruhi praktik tersebut dengan memberikan akses terhadap kebijakan dan sumber daya pemerintah. Penelitian ini turut memperkaya literatur mengenai hubungan antara koneksi politik dan pengungkapan CSR di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi perusahaan maupun investor terkait pengungkapan CSR pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk merancang strategi CSR

yang lebih tepat sasaran serta sejalan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Bagi investor, temuan penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai referensi dalam mengevaluasi tingkat transparansi serta komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbarui regulasi terkait CSR, khususnya pada perusahaan dengan koneksi politik. Dengan memahami pola dan dampak implementasi CSR dalam konteks ini, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat guna, mendorong transparansi, serta memastikan bahwa program CSR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan kontribusi berwujud pemahaman yang lebih komprehensif bagi peneliti dalam mengkaji keterkaitan antara CSR dan koneksi politik. Selain itu, studi ini juga berguna selaku wadah bagi peneliti untuk mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam melakukan analisis terhadap transparansi serta efektivitas pengungkapan CSR dalam praktik bisnis.